

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah:

1. Calon apoteker harus melatih diri untuk bisa menumbuhkan rasa peduli, berempati serta dapat cermat dalam pemilihan obat untuk pasien sehingga efek terapeutik yang diinginkan dapat tercapai
2. Calon apoteker sebaiknya lebih memperkuat fondasi dalam hal ilmu pengetahuan sehingga ketika berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang lain maupun dengan pasien dapat menyampaikan dengan tepat dan dapat dimengerti dengan mudah.
3. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri saat melakukan KIE dan lebih banyak dilakukan penyampaian terapi non farmakologi.
4. Calon apoteker sebaiknya diberi kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan kunjungan ke rumah pasien dan harus dipersiapkan dengan cara pemberian tugas dalam penanganan obat resep maka ketika berinteraksi dengan pasien calon apoteker dapat menjelaskan dengan tepat dan mudah dimengerti, sehingga eksistensi apoteker dapat meningkat.
5. *Follow up* ke pasien tentang penggunaan obat sebaiknya perlu dilakukan supaya pasien beranggapan bahwa apoteker memperhatikan kondisinya dan dapat meningkatkan peran apoteker di masyarakat.

Daftar Pustaka

- British National Formulary*, 2009, 58th ed., BMJ Group and RPS Publishing, London.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS. 2016. MIMS Indonesia. <http://www.mims.com/> (online). Diakses pada November 2016.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/ MENKES/ SK/ VII/ 1990 tentang *Obat Wajib Apotek*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 992/ MENKES/ PER/ X/ 1993 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/ MENKES/ SK /IX/ 2004 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Lacy, C.F. *et al.* 2008. *Drug Information Handbook* 17th Edition. American Pharmacist Association, USA.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41.1384 tentang *Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka*.
- Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang Sering Disalahgunakan*.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/ MENKES/ PER/ X/ 1993 tentang *Kriteria Obat yang Boleh Diserahkan Tanpa Resep*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Perubahan Penggolongan Psikotropika*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang *Perubahan Penggolongan Narkotika*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*.
- Seto, S., & N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi ed. 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweerman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36thed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.005/ PP.IAI/ 1418/ VII/ 2014 tentang *Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktek Apoteker*.
- Tatro, D. S., 2003, *A to Z Drug Fact, Fact and Comparison*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga
Kesehatan*.